

ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN PETANI DI JAWA TIMUR

Jabal Tarik Ibrahim
Aris Soelistyo
Sutikno

Abstract

The main objective of this research is to produce appropriate and integrated solution model to the farmers' poverty in East Jawa province. Some steps are implemented to make poverty solution in each region or city. The first is identifying the number of poor people, the second is analyzing the cause of poverty, and the third is analyzing the farmers' welfare level. The instruments used to measure the farmers' welfare level include the farmers' exchange rate (NTP), the farmers' additional rate, and the farmers' buying index. Based on the poverty analysis result, the cities the highest number of poor people include Sampang, Malang, Bojonegoro, Lamongan, and Bangkalan. The absolute factors that cause the poverty of family in East Jawa include heredity factor, the number of family member to support, and low income. Based on the welfare condition analysis, the findings show that the farmers' exchange rate of East Jawa province tends to be fluctuating with the lowest NTP occurs in May and the highest in October as a result of the raise of all sub-sector of agriculture price index. The cities which have the highest NTP include Probolinggo, Malang and Ngawi, and the lowest include occurs in Pamekasan, Jember, and Gresik.

PENDAHULUAN

Pemahaman kemiskinan secara konvensional umumnya diartikan sebagai kondisi masyarakat (komunitas) yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Oleh karena itu sering sekali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas tersebut. Namun sebetulnya pendekatan permasalahan kemiskinan bukan hanya dari segi pendapatan saja, tetapi pemaknaan kemiskinan diartikan lebih secara plural, paling tidak terdapat 6 macam kemiskinan yang ditanggung komunitas, yaitu: *Pertama*, kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal. *Kedua*, kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja

buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah. *Ketiga*, kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan. *Keempat*, kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas. *Kelima*, kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi. *Keenam*, kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.

Pada sisi yang lain, perencanaan, penentuan sasaran, dan kriteria miskin serta pengaturan teknis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah atau instansi terkait seringkali bersifat terpusat (*top-down*), sehingga program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau daerah tertentu. Selain itu, program-program yang dilaksanakan cenderung bersifat sektoral yang sering kali mengakibatkan adanya semangat ego-sektoral dan saling tumpang tindih. Keadaan ini lebih dipersulit karena umumnya tiap departemen atau instansi mempunyai definisi dan kriteria sendiri tentang kemiskinan. Akibatnya kemiskinan cenderung dipahami secara parsial, dan penanggulangannya cenderung bersifat sektoral. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya menjaga kontinuitas program dan cenderung membuat program baru, dimana program baru tersebut bukan merupakan kelanjutan program lama. Sehingga banyak program penanggulangan kemiskinan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek, akibatnya masyarakat kurang berpartisipasi secara aktif dalam menggali potensi dirinya dan lingkungannya untuk keluar dari kemiskinan.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: a) Mengidentifikasi kondisi kemiskinan di tiap-tiap kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur; b) Menganalisis penyebab kemiskinan di tiap-tiap kabupaten/ kota di wilayah Jawa Timur; c) Menganalisis kondisi kesejahteraan petani di Jawa Timur

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, dimana data primer dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner, pedoman observasi maupun pedoman wawancara yang telah dipersiapkan kepada pihak-pihak yang berkompeten dengan perihal

Analisis Karakteristik Kemiskinan Petani di Jawa Timur

kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur. Sementara itu, data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi tentang kondisi kemiskinan dari instansi terkait yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini.

Penelitian menggunakan beberapa alat analisis untuk menjawab tujuan penelitian dan output yang ingin dicapai dalam penelitian. Alat analisis tersebut meliputi:

1) Indek Daya Beli (IDB)

Indeks Daya Beli (IDB) dirumuskan sebagai hasil bagi besaran PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dengan IHK.

$$IDB = \frac{\text{Indeks_PDRB per Kapita_ADHB}}{IHK}$$

dimana:

IDB = Indeks Daya Beli;

IHK = Indeks Harga Konsumen.

ADHB = Atas Dasar Harga Berlaku

2) Nilai Tukar Petani

Formula untuk penghitungan Nilai Tukar Petani yaitu :

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Keterangan :

NTP = Nilai Tukar Petani

I_t = Indeks harga yang diterima petani

I_b = Indeks harga yang dibayar petani

Pertimbangan dan asumsi yang mendasari penggunaan formula di atas adalah:

1. Trend harga tidak dipengaruhi perbedaan kualitas atau spesifikasi komoditas.
2. Perbedaan harga komoditas antar kabupaten tidak berpengaruh
3. Dapat dilakukan penggantian spesifikasi atau penggantian kualitas jenis barang.

HASIL PENELITIAN

Penduduk Miskin

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir yaitu sejak tahun 2001 hingga 2006, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur cenderung mengalami fluktuasi. Dalam periode 2001 hingga 2004 penduduk miskin di wilayah Jawa Timur cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2001 penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 7.267.093 jiwa menjadi 6.979.565 jiwa pada tahun 2004. Dengan demikian dalam kurun waktu tersebut penduduk miskin di Jawa Timur mengalami pengurangan sebanyak kurang lebih 10%. Namun sejak 2005 sampai 2006 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur kembali mengalami kenaikan. Berikut ini gambaran penduduk miskin di Jawa Timur berdasarkan masing-masing kabupaten/ kota di wilayah Jawa Timur.

Data di bawah menunjukkan bahwa daerah yang paling banyak jumlah penduduk miskinnya pada tahun 2006 adalah Kabupaten Sampang, yaitu sebanyak 508.140 jiwa. Selain Kabupaten Sampang, daerah lain yang tergolong mempunyai penduduk miskin cukup banyak adalah Kabupaten Malang dengan penduduk miskin sebanyak 488.117 jiwa, semudian disusul oleh Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bangkalan.

Kondisi kemiskinan di atas menggambarkan bahwa daerah-daerah perkotaan secara relatif lebih mempunyai penduduk miskin lebih sedikit dibandingkan wilayah kabupaten. Hal ini bisa juga disebabkan oleh jumlah penduduk yang berada di wilayah perkotaan relatif lebih sedikit dibanding penduduk di wilayah kabupaten. Oleh sebab itu untuk melihat kondisi kemiskinan berdasarkan wilayah tidak cukup hanya dengan melihat jumlah penduduk miskin saja, namun perlu juga melihat prosentase penduduk miskin dibanding dengan total penduduk di wilayah tersebut. Berikut ini prosentase penduduk miskin berdasarkan kabupaten/ kota di Wilayah Jawa Timur.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Wilayah Jawa Timur tahun 2001 - 2006

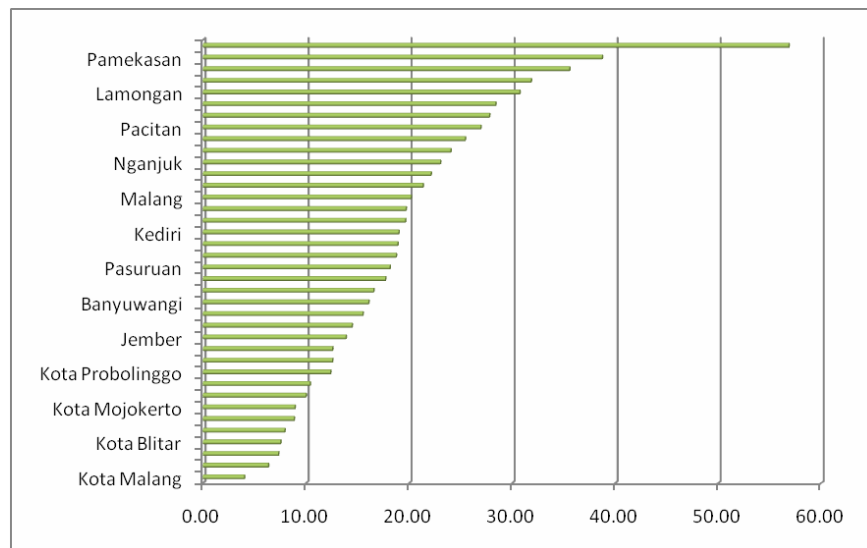
No	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006*)
1	Pacitan	164,638	162,705	154,387	176,190	148,016	148,097
2	Ponorogo	265,801	262,680	288,014	236,691	231,321	146,572
3	Trenggalek	163,643	161,721	150,605	193,583	188,780	152,044
4	Tulungagung	177,047	174,968	170,044	167,551	150,817	123,563
5	Blitar	208,300	205,854	192,317	195,366	166,354	143,088
6	Kediri	256,639	253,625	242,349	260,010	242,055	289,483
7	Malang	470,761	465,233	351,638	327,051	413,674	488,117
8	Lumajang	211,352	208,870	227,475	221,273	183,763	181,555
9	Jember	493,946	488,146	490,047	430,576	630,460	315,564
10	Banyuwangi	257,283	254,262	278,495	264,583	357,802	253,027
11	Bondowoso	274,381	271,159	359,067	363,878	401,795	142,364
12	Situbondo	164,228	162,299	175,905	159,016	242,539	125,183
13	Probolinggo	273,901	270,685	280,219	313,849	348,485	257,184
14	Pasuruan	289,538	286,138	243,011	211,851	307,587	269,125
15	Sidoarjo	104,324	103,099	103,327	74,631	87,677	162,156
16	Mojokerto	147,169	145,441	169,258	199,330	132,566	148,422
17	Jombang	280,810	277,512	236,411	231,128	170,376	228,933
18	Nganjuk	257,354	254,332	199,523	208,818	199,054	245,259
19	Madiun	148,618	146,873	124,951	132,124	141,630	142,519
20	Magetan	142,487	140,814	123,207	149,736	68,653	96,336
21	Ngawi	165,498	163,555	136,264	145,030	245,729	218,062
22	Bojonegoro	333,455	329,539	355,175	333,543	493,427	398,168
23	Tuban	253,193	250,220	250,903	249,135	283,202	313,426
24	Lamongan	257,802	254,775	194,266	244,798	341,363	391,426
25	Gresik	148,834	147,086	94,576	94,771	146,632	209,933
26	Bangkalan	154,256	152,445	181,515	195,899	328,537	336,317
27	Sampang	342,725	338,700	427,663	333,984	624,120	508,140
28	Pamekasan	138,426	136,800	144,755	184,097	318,653	302,868
29	Sumenep	209,135	206,679	177,629	191,824	321,963	296,861
71	Kota Kediri	42,636	42,135	36,128	28,643	25,276	18,649
72	Kota Blitar	18,686	18,467	18,398	14,087	13,722	9,445
73	Kota Malang	72,120	71,273	55,516	50,720	37,009	31,276
74	Kota Probolinggo	29,258	28,914	26,997	12,680	18,339	25,696
75	Kota Pasuruan	18,083	17,871	14,858	15,307	17,995	18,421
76	Kota Mojokerto	16,559	16,365	13,668	14,858	13,585	10,548
77	Kota Madiun	17,709	17,501	13,420	14,800	13,801	10,844
78	Kota Surabaya	296,498	293,016	362,308	320,999	316,704	282,004
79	Kota Batu	-	-	-	17,153	17,535	14,980
	Jawa Timur	7,267,093	7,181,757	7,064,289	6,979,565	8,390,996	7,455,655

Tabel 2. Prosentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Wilayah Jawa Timur Tahun 2001 - 2006

No	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Rata-rata	Kategori
1	Pacitan	31.16	30.65	28.69	32.55	27.01	26.94	29.50	Tinggi
2	Ponorogo	31.57	31.18	33.13	27.09	26.19	16.54	27.62	Sedang
3	Trenggalek	24.93	24.39	22.50	28.66	27.55	22.11	25.02	Tinggi
4	Tulungagung	18.95	18.65	17.72	17.34	15.38	12.55	16.77	Rrendah
5	Blitar	19.53	19.26	17.32	17.47	14.64	12.54	16.79	Rrendah
6	Kediri	18.13	17.83	16.44	17.47	15.95	18.98	17.47	Sedang
7	Malang	19.35	18.97	13.99	13.86	17.19	20.17	17.26	Sedang
8	Lumajang	21.80	21.45	22.77	21.98	17.98	17.69	20.61	Sedang
9	Jember	22.44	22.04	21.97	19.19	27.76	13.85	21.21	Rrendah
10	Banyuwangi	17.24	17.00	18.09	17.08	22.79	16.06	18.04	Sedang
11	Bondowoso	39.65	39.00	50.69	51.03	55.58	19.62	42.60	Sedang
12	Situbondo	27.05	26.59	28.34	25.44	38.27	19.68	27.56	Sedang
13	Probolinggo	27.00	26.43	27.08	30.03	32.73	24.03	27.88	Tinggi
14	Pasuruan	20.86	20.31	17.15	14.75	20.86	18.12	18.68	Sedang
15	Sidoarjo	6.47	6.20	6.17	4.33	4.84	8.82	6.14	Rrendah
16	Mojokerto	15.97	15.55	17.51	20.26	13.02	14.44	16.13	Rrendah
17	Jombang	24.73	24.26	20.18	19.54	14.12	18.88	20.29	Sedang
18	Nganjuk	26.35	25.96	19.41	20.12	18.79	23.02	22.28	Tinggi
19	Madiun	23.20	22.91	19.02	20.03	21.27	21.34	21.30	Tinggi
20	Magetan	23.03	22.64	19.86	24.11	11.04	15.49	19.36	Sedang
21	Ngawi	20.32	20.05	16.23	17.17	28.75	25.43	21.33	Tinggi
22	Bojonegoro	28.45	27.96	29.30	27.28	39.63	31.83	30.74	Sangat Tinggi
23	Tuban	23.88	23.42	23.32	22.98	25.74	28.38	24.62	Tinggi
24	Lamongan	21.74	21.41	15.72	19.65	26.92	30.72	22.69	Sangat Tinggi
25	Gresik	14.54	14.13	8.95	8.81	13.20	18.73	13.06	Sedang
26	Bangkalan	19.02	18.66	20.50	21.73	35.09	35.56	25.09	Sangat Tinggi
27	Sampang	45.39	44.56	51.34	39.33	70.58	56.84	51.34	Sangat Tinggi
28	Pamekasan	19.89	19.47	19.58	24.51	41.10	38.73	27.21	Sangat Tinggi
29	Sumenep	21.09	20.73	17.22	18.41	30.29	27.78	22.59	Tinggi
71	Kota Kediri	17.33	17.04	14.34	11.32	9.92	7.30	12.88	Rrendah
72	Kota Blitar	15.64	15.45	14.94	11.36	10.95	7.51	12.64	Rrendah
73	Kota Malang	9.44	9.25	7.22	6.57	4.73	3.99	6.87	Rrendah
74	Kota Probolinggo	15.14	14.84	13.50	6.27	8.87	12.36	11.83	Rrendah
75	Kota Pasuruan	10.61	10.38	8.42	8.56	9.82	9.98	9.63	Rrendah
76	Kota Mojokerto	15.05	14.73	12.22	13.07	11.57	8.90	12.59	Rrendah
77	Kota Madiun	10.73	10.55	7.96	8.70	8.06	6.32	8.72	Rrendah
78	Kota Surabaya	11.30	11.11	13.48	12.00	11.70	10.38	11.66	Rrendah
79	Kota Batu	-	-	-	9.51	9.36	7.91	8.93	Rrendah
	Jawa Timur	20.73	20.34	19.52	19.10	22.51	19.89	20.35	Sedang

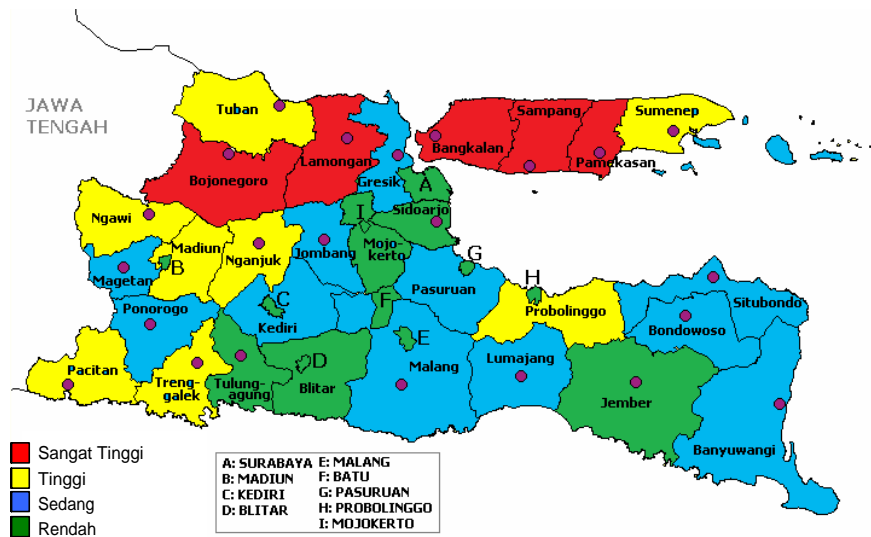
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa daerah yang paling tinggi prosentase penduduk miskinnya selama lima tahun terakhir adalah Kabupaten Sampang, yaitu sebanyak 56.84% atau lebih separuh penduduk sampang tergolong miskin. Selain Kabupaten Sampang, daerah lain yang tergolong mempunyai prosentase penduduk miskin cukup tinggi adalah Kabupaten Pamekasan dengan prosentase penduduk miskin sebesar 38.73%, semudian disusul oleh Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Lamongan.

Gambar 2. Peringkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk Miskin



Berdasarkan data prosentase penduduk miskin, maka masing-masing daerah kabupaten/ kota dapat dibagi menjadi empat kriteria. Kreteria tersebut didasarkan atas empat interval yaitu 1) prosentase penduduk miskin lebih dari 30% tergolong “sangat tinggi”; 2) prosentase penduduk miskin 21% sampai dengan 29% tergolong “tinggi”; 3) prosentase penduduk miskin 15% sampai dengan 20% tergolong “sedang”; dan 4) prosentase penduduk miskin kurang dari 15% tergolong “rendah”. Berikut ini gambaran daerah kabupaten/ kota berdasarkan prosentase penduduk miskin.

Gambar 3. Peta Kabupaten/kota Berdasarkan Prosentase Penduduk Miskin



Gambar peta di atas menunjukkan bahwa, daerah yang mempunyai prosentase penduduk miskin yang tergolong “sangat tinggi” ada lima daerah, yaitu Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro. Daerah yang tergolong “tinggi” berdasarkan prosentase penduduk miskinnya ada 8 kabupaten yaitu Madiun, Trenggalek, Nganjuk, Probolinggo, Ngawi, Pacitan, Sumenep, dan Tuban. Sedangkan daerah yang prosentase penduduk miskinnya tergolong “sedang” ada 11 kabupaten yaitu: Magetan, Banyuwangi, Ponorogo, Lumajang, Pasuruan, Gresik, Jombang, Kediri, Bondowoso, Situbondo, dan Malang.

Penyebab Kemiskinan

Penyebab rumah tangga miskin paling besar di Jawa Timur adalah “pendapatan yang rendah”. Pada tahun 2006 jumlah rumah tangga miskin yang disebabkan karena “pendapatan yang rendah” sebesar 3.738.758 rumah tangga. Daerah paling banyak rumah tangga miskinnya yang disebabkan karena “pendapatan yang rendah” adalah Kabupaten Jember. Kabupaten tersebut mempunyai rumah tangga miskin yang disebabkan karena “pendapatan yang rendah” sebanyak 252.978 rumah tangga. Daerah yang mempunyai rumah tangga miskin disebabkan karena “pendapatan yang rendah” paling sedikit adalah

daerah Kota Batu. Kota tersebut hanya mempunyai mempunyai rumah tangga miskin yang disebabkan karena “pendapatan yang rendah” sebanyak 7.415 rumah tangga.

Tabel 5. Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Penyebab Kemiskinan Masing-masing Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Leluhur/ Orang tua miskin	Pendidikan KRT rendah	Pendapatan rendah	Jumlah Tanggungan banyak	Musibah	Usaha rugi	Utang cukup banyak
1	Pacitan	46,576	61,182	63,888	13,296	13,218	2,706	4,017
2	Ponorogo	87,681	116,152	123,561	47,641	23,959	22,305	29,615
3	Trenggalek	58,094	62,157	83,891	25,174	21,373	3,686	17,564
4	Tulungagung	46,934	66,033	79,121	23,589	21,895	4,005	8,968
5	Blitar	87,766	112,428	126,288	33,930	24,700	8,481	7,758
6	Kediri	126,992	147,781	173,086	42,869	49,483	12,964	25,821
7	Malang	134,119	187,578	229,121	66,757	37,573	15,429	22,425
8	Lumajang	54,488	63,206	77,298	17,648	14,012	7,504	4,660
9	Jember	170,636	197,654	252,978	73,463	59,404	23,507	49,601
10	Banyuwangi	79,153	103,384	128,550	21,602	15,932	3,712	12,218
11	Bondowoso	106,776	128,748	138,023	28,784	31,308	15,630	22,701
12	Situbondo	86,958	97,010	105,400	26,429	25,174	14,700	35,025
13	Probolinggo	105,973	122,020	130,380	33,398	17,524	15,383	29,982
14	Pasuruan	62,585	89,382	102,281	42,400	19,777	13,348	16,858
15	Sidoarjo	36,383	64,583	77,547	31,724	16,611	2,599	21,360
16	Mojokerto	30,991	60,472	76,540	24,561	21,113	6,664	16,541
17	Jombang	78,426	96,443	122,905	42,080	37,225	14,928	36,456
18	Nganjuk	73,877	111,669	138,789	44,035	16,179	9,996	13,747
19	Madiun	50,687	73,060	77,434	16,658	10,156	12,871	9,184
20	Magetan	20,425	25,176	34,434	9,107	9,500	7,566	4,899
21	Ngawi	49,084	73,616	106,843	21,238	15,546	22,758	30,548
22	Bojonegoro	107,712	154,326	175,779	44,834	26,868	13,577	17,345
23	Tuban	92,330	116,018	135,851	42,304	24,661	11,600	25,382
24	Lamongan	101,134	104,212	141,482	44,723	10,995	15,436	28,682
25	Gresik	35,955	60,293	65,469	30,235	11,651	1,420	10,690
26	Bangkalan	63,678	100,679	115,550	52,693	38,251	26,682	33,609
27	Sampang	119,915	139,308	152,304	66,387	31,331	60,199	46,139
28	Pamekasan	108,119	108,573	116,840	47,856	28,895	37,164	32,462
29	Sumenep	72,914	88,045	104,675	37,813	25,051	34,894	37,749
71	Kota Kediri	5,707	8,655	12,189	3,738	2,751	1,376	4,332
72	Kota Blitar	2,705	5,791	8,104	1,929	2,312	289	868
73	Kota Malang	9,923	18,282	27,663	7,626	5,424	1,655	6,338
74	Kota Probolinggo	8,713	12,164	13,668	6,909	2,252	2,702	2,403
75	Kota Pasuruan	3,312	7,864	8,415	2,898	2,070	1,518	2,070
76	Kota Mojokerto	3,741	5,563	7,648	3,042	1,914	1,218	3,388
77	Kota Madiun	5,678	9,156	15,106	5,228	3,194	2,323	4,652
78	Kota Surabaya	115,166	145,543	182,242	48,092	37,971	16,451	46,826
79	Kota Batu	3,287	5,278	7,415	1,899	1,607	428	948
	Jumlah	2,454,593	3,149,484	3,738,758	1,134,589	758,860	469,674	723,831

Sumber: Survei Sosial Daerah Jawa Timur Tahun 2006

Selain disebabkan karena “pendapatan yang rendah”, faktor lain yang menjadi penyebab rumah tangga miskin di Jawa Timur adalah “pendidikan kepala rumah tangga rendah”. Pada tahun 2006 jumlah rumah tangga miskin yang disebabkan karena “pendidikan kepala rumah tangga rendah” sebanyak 3.149.484 rumah tangga.

Tabel 6. Prosentase Tangga Miskin Menurut Penyebab Kemiskinan Masing-masing Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Leluhur/ Ortu juga miskin	Pendidik an KRT rendah	Pendapat an rendah	Jumlah Tangg an banyak	Musib ah	Usaha rugi	Utang cukup banyak	Jum lah
1	Pacitan	22.73	29.86	31.18	6.49	6.45	1.32	1.96	100.00
2	Ponorogo	19.45	25.76	27.40	10.57	5.31	4.95	6.57	100.00
3	Trenggalek	21.36	22.86	30.85	9.26	7.86	1.36	6.46	100.00
4	Tulungagung	18.73	26.36	31.58	9.42	8.74	1.60	3.58	100.00
5	Blitar	21.87	28.01	31.47	8.45	6.15	2.11	1.93	100.00
6	Kediri	21.93	25.52	29.89	7.40	8.55	2.24	4.46	100.00
7	Malang	19.35	27.07	33.06	9.63	5.42	2.23	3.24	100.00
8	Lumajang	22.82	26.47	32.37	7.39	5.87	3.14	1.95	100.00
9	Jember	20.63	23.89	30.58	8.88	7.18	2.84	6.00	100.00
10	Banyuwangi	21.71	28.36	35.26	5.93	4.37	1.02	3.35	100.00
11	Bondowoso	22.62	27.28	29.24	6.10	6.63	3.31	4.81	100.00
12	Situbondo	22.26	24.83	26.98	6.76	6.44	3.76	8.96	100.00
13	Probolinggo	23.31	26.84	28.68	7.35	3.85	3.38	6.59	100.00
14	Pasuruan	18.06	25.79	29.51	12.23	5.71	3.85	4.86	100.00
15	Sidoarjo	14.51	25.75	30.92	12.65	6.62	1.04	8.52	100.00
16	Mojokerto	13.08	25.53	32.31	10.37	8.91	2.81	6.98	100.00
17	Jombang	18.30	22.51	28.69	9.82	8.69	3.48	8.51	100.00
18	Nganjuk	18.09	27.35	33.99	10.79	3.96	2.45	3.37	100.00
19	Madiun	20.27	29.22	30.97	6.66	4.06	5.15	3.67	100.00
20	Magetan	18.38	22.66	30.99	8.20	8.55	6.81	4.41	100.00
21	Ngawi	15.36	23.03	33.43	6.64	4.86	7.12	9.56	100.00
22	Bojonegoro	19.93	28.56	32.53	8.30	4.97	2.51	3.21	100.00
23	Taban	20.60	25.89	30.31	9.44	5.50	2.59	5.66	100.00
24	Lamongan	22.64	23.33	31.68	10.01	2.46	3.46	6.42	100.00
25	Gresik	16.67	27.95	30.35	14.02	5.40	0.66	4.96	100.00
26	Bangkalan	14.77	23.35	26.80	12.22	8.87	6.19	7.80	100.00
27	Sampang	19.48	22.63	24.74	10.78	5.09	9.78	7.50	100.00
28	Pamekasan	22.53	22.62	24.35	9.97	6.02	7.74	6.76	100.00
29	Sumenep	18.18	21.95	26.09	9.43	6.24	8.70	9.41	100.00
31	Kota Kediri	14.73	22.34	31.46	9.65	7.10	3.55	11.18	100.00
32	Kota Blitar	12.30	26.33	36.84	8.77	10.51	1.31	3.95	100.00
33	Kota Malang	12.90	23.77	35.97	9.92	7.05	2.15	8.24	100.00
34	Kota Probolinggo	17.85	24.92	28.00	14.15	4.61	5.54	4.92	100.00
35	Kota Pasuruan	11.77	27.94	29.90	10.30	7.35	5.39	7.35	100.00
36	Kota Mojokerto	14.11	20.98	28.85	11.47	7.22	4.59	12.78	100.00
37	Kota Madiun	12.52	20.20	33.32	11.53	7.05	5.12	10.26	100.00
38	Kota Surabaya	19.44	24.57	30.77	8.12	6.41	2.78	7.91	100.00
39	Kota Batu	15.76	25.30	35.54	9.10	7.70	2.05	4.54	100.00
	Jumlah	19.75	25.34	30.08	9.13	6.11	3.78	5.82	100.00

Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan di Jawa Timur, maka bagian selanjutnya akan dibahas penyebab kemiskinan berdasarkan karakteristik kemiskinan struktural dan kemiskinan absolut. Untuk itu maka terlebih dahulu harus dilihat prosentase dari masing-masing faktor penyebab kemiskinan tersebut. Berikut ini gambaran rumah tangga miskin masing-masing kabupaten/ kota berdasarkan prosentase penyebabnya.

Penyebab rumah tangga miskin di wilayah Jawa Timur lebih banyak disebabkan karena faktor absolut atau kemiskinan absolut. Kondisi tersebut terlihat pada gambar di atas, dimana kemiskinan absolut, yang disebabkan karena faktor keturunan, jumlah tanggungan keluarga, dan pendapatan rendah pada tahun 2006 mencapai sebesar 59%. Sedangkan rumah tangga miskin yang disebabkan karena faktor struktural pada tahun yang sama mencapai 35%. Sementara rumah tangga miskin yang disebabkan karena faktor musibah hanya sebesar 6%.

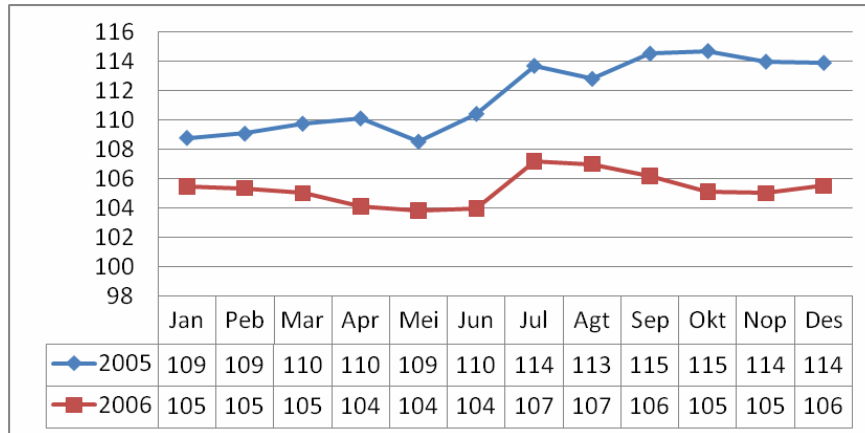
Kondisi Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani

Rata-rata NTP Jawa Timur bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 6,07 persen dari 105,29 menjadi 111,68, dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani (21,37 persen) lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (14,40 persen). Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani periode bulan Januari sampai dengan Desember 2006, secara umum masih lebih baik dibanding tahun 2005.

Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pola NTP bulan Januari sampai dengan Desember 2006 secara umum tidak berbeda dengan tahun 2005. NTP Jawa Timur 2006 terendah yaitu pada bulan Mei sebesar 108,52 yang disebabkan turunnya indeks harga tanaman bahan makanan sebesar -3,63 persen dan indeks harga peternakan -0,07 persen. Sedangkan NTP tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 114,68 yang disebabkan naiknya indeks harga semua sub sektor pertanian. Jika dilihat besarnya perubahan, kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 2,96 persen kenaikan indeks harga yang diterima petani (3,53 persen) lebih besar dibanding kenaikan indeks harga yang dibayar petani (0,55 persen)

Gambar 6. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur Periode Tahun 2005 – 2006 (2002 = 100)



Indeks Diterima Petani

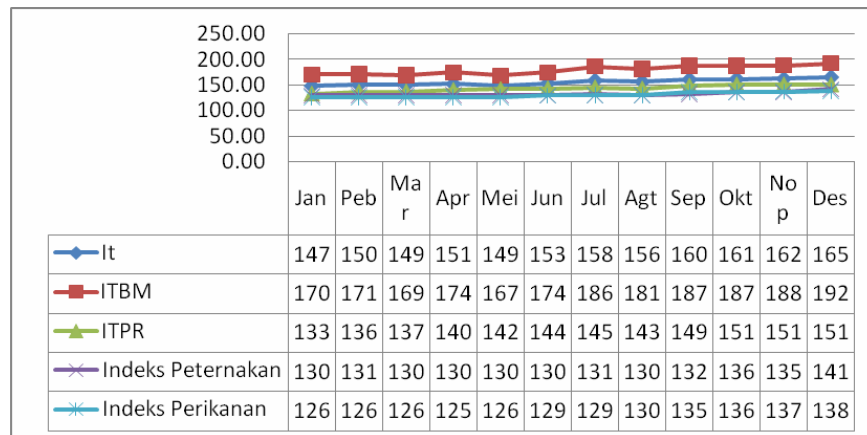
Indeks harga yang diterima petani pada tahun 2006 cenderung meningkat dan secara rata-rata selama periode Januari sampai dengan Desember mengalami kenaikan 21,37 persen dari 127,86 menjadi 155,19 dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan indeks disebabkan oleh naiknya indeks pada semua kelompok komoditi, tertinggi terjadi pada sub sektor tanaman bahan makanan sedangkan terendah sub sector peternakan.

Tabel 8. Rata-rata Indeks Harga Diterima Petani Jawa Timur Menurut Sub Sektor Pertanian Tahun 2005 2006 (2002 = 100)

No.	Kelompok/Jenis Komoditi	Rata-rata		Perubahan
		2005	2006	2005-2006
	Indeks Diterima Petani	127,86	155,19	21,37
1	Tanaman Bahan Makanan	133,25	178,86	34,23
2	Tanaman Perkebunan Rakyat	129,58	143,54	10,77
3	Peternakan	122,23	132,17	8,13
4	Perikanan	118,38	130,33	10,09

Gambar di bawah menunjukkan bahwa selama bulan Januari sampai dengan Desember 2006 indeks harga sub sektor tanaman bahan makanan mengalami fluktuasi yang lebih tajam dibanding sub sektor lainnya. Hal ini disebabkan fluktuasi harga sayur-sayuran yang sangat tajam terutama cabai, tomat, kacang panjang dan bawang merah.

Gambar 7. Indeks Harga Diterima Petani Jawa Timur Periode Tahun 2006 (2002 = 100)



Indeks Dibayar Petani

Rata-rata indeks harga yang dibayar petani periode bulan Januari sampai dengan September 2006 mengalami kenaikan sebesar 14,40 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 121,43 menjadi 138,92. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya indeks kelompok konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi.

Tabel 9. Rata-rata Indeks Dibayar Petani Jawa Timur Menurut Kelompok/Jenis Komoditi Tahun 2005 – 2006 (2002 = 100)

No.	Kelompok/Jenis Komoditi	Rata-rata		Perubahan 2005-2006
		2005	2006	%
	Indeks Dibayar Petani	121,43	138,92	14,40
1	Konsumsi Rumah Tangga	122,38	141,25	15,42
1.1	Makanan	125,32	146,48	16,88
1.2	Perumahan	121,77	143,66	17,98
1.3	Pakaian	113,76	119,51	5,05
1.4	Kesehatan	109,43	113,74	3,94
1.5	Pendidikan	115,49	119,59	3,55
1.6	Transportasi	116,34	134,30	15,44
2	Biaya Produksi	118,39	131,04	10,69
2.1	Tanaman Bahan Makanan	120,97	132,98	9,93
2.2	Tanaman Perkebunan Rakyat	109,82	128,06	16,61
2.3	Peternakan	125,84	137,92	9,60
2.4	Perikanan	117,73	148,59	26,21

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Beberapa temuan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah :

- Daerah yang paling banyak jumlah penduduk miskinnya pada tahun 2006 adalah Kabupaten Sampang, yaitu sebanyak 508.140 jiwa.
- Penyebab rumah tangga miskin di wilayah Jawa Timur lebih banyak disebabkan karena faktor absolut atau kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut disebabkan oleh faktor keturunan, jumlah tanggungan keluarga, dan pendapatan rendah pada tahun 2006 mencapai sebesar 59%. Sedangkan rumah tangga miskin yang disebabkan karena faktor struktural pada tahun yang sama mencapai 35%.

Kondisi kesejahteraan petani dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur cenderung fluktuatif, terendah biasanya terjadi pada bulan Mei, hal ini disebabkan karena turunnya indeks harga tanaman bahan makanan dan indeks harga peternakan. Sedangkan NTP tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yang disebabkan naiknya indeks harga semua sub sektor pertanian.

- Nilai Tukar Petani NTP tertinggi terjadi di Kabupaten Probolinggo sebesar 120,43, diikuti Malang 117,15 dan Ngawi 117,01. Sedangkan 3 kabupaten yang mempunyai NTP terendah adalah Kabupaten Pamekasan sebesar 102,48, Jember 105,18 dan Gresik 107,04.

Saran

Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka dalam upaya penanganan dan pengentasan kemiskinan penelitian ini menyarankan secara spesifik kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan diarahkan pada:

1. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang merintangai aksesibilitas dan lebih berpihak kepada petani miskin serta konsisten dalam pelaksanaannya;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan petani miskin;
3. Penajaman program pembangunan pertanian yang diarahkan pada desa-desa dan kantong-kantong petani miskin;
4. Peningkatan pemenuhan dan aksesibilitas petani miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu;
5. Peningkatan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi petani miskin secara gratis melalui program jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, dan program-program lainnya yang berkelanjutan;
6. Peningkatan aksesibilitas dan layanan pendidikan dasar secara gratis dan bermutu melalui peningkatan angka partisipasi murni (APM), pengurangan beban operasional sekolah, mempersempit kesenjangan pendidikan antara kawasan perdesaan dan perkotaan.
7. Peningkatan ketersediaan dan akses petani miskin terhadap rumah murah, sanitasi dan lingkungan yang sehat.
8. Peningkatan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi petani miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah).
9. Pengembangan potensi wilayah dan cluster ekonomi perdesaan baik pada sekitar hutan, persawahan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
10. Pemenuhan kebutuhan infra struktur dasar dan sarana pertanian sesuai dengan karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses dan

meningkatkan peluang bagi kelompok petani miskin untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan basis mata pencahariannya;

11. Peningkatan keterlibatan petani miskin dalam pengambilan keputusan pembangunan pertanian terutama yang secara langsung menyangkut kepentingan dan eksistensinya melalui forum dialog yang konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2005. Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. Jakarta.
- Anonimous. 2007. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Anderson, Sue 1990, Core Indicators of Nutritional State for Difficult to sample Population, *Journal of Nutrition* 120.
- Braun Von,J.H. Bousl. S.Kumar and R.Panja-Lorch, 1992, *Improving Food Security of The Poor: Concept, Policy and Programs*. IFRI, Washington.,D.C.
- Chung,K,L, Haddad, J.Ramakhrisma and F.Riely,1997, *Identifying the food Insecure : The Application of Mixed Method Approach in India* IFPRI, Washington D.C.
- De Janvry,Alain and Elisabeth Sadoulet,1991, "Food Self Sufficiency and Food Security in India: Achievements and Contradictions," In *National and Regional Self Sufficiency goal: Implications for International Agriculture*, edited by Ruppel and Kellogg. Boulder, Colo: Lynne Rienner.
- Dethier,Jean Jacques1989, "Note on the Analysis of The Impact of Agricultural Policy Reform in Algeria," *Agricultura and Rural Development Departement*, World Bank
- FAO,1996, *Food Security Assesment (Document WFS 96/ Tech/ 7)*. Rome.
- Hayami and Ruttan, 1985, *Agriculture Development: An International Perspective* . Baltimore: John Hopkins University Press.
- Hanani, Nuhfil; Jabal Tarik Ibrahim. 2003. *Evaluasi Akhir Program Pembelian Gabah di Propinsi Jawa Timur*. Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur. Surabaya.

Analisis Karakteristik Kemiskinan Petani di Jawa Timur

- Hanani, Nuhfil; Jabal Tarik Ibrahim. 2003. Evaluasi Kinerja Proyek Pemberdayaan Kelembagaan Pangan di Pedesaan di Pulau Jawa. Jurnal Ilmu Pertanian Agrivita Volume 25 Nomor 2 Juni 2003. Fakultas Pertanian Unibraw. Malang.
- Intriligator, 1996, *Econometric Models, Technique, and Applications*, Prentice-Hall International, Inc, New Jersey
- Lave, Lester, 1962, "Empirical Estimates of technological Change in United States Agriculture, 1850-1958" *Journal of Farm Economics* 44, 941-52
- Maxwell, Simon and Timothy R. Frankerberger, 1996, *Household Food Security: Concept, Indicators, Measurements. A Technical Review*. Unicef and IFAD, New York and Rome
- Maxwell, D.C. 1996, *Measuring Food Security: The Frequency and Severity of Coping Strategies*. Food Policy
- Reutlinger, Shiomu 1986, *Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries*", Washington, D.C.; World Bank
- Valdes, Alberto and Konandreas, 1981, "Assessing Food Security Based on National Aggregates in Developing Countries," In *Food Security for Developing Countries*, Edited by Valdes, Boulder, Colo: Westview Press
- World Bank, 1994. *Indonesia : Stability, Growth and Equity in Repelita VI*, Country Department II, East Asia
- World Bank. 2008. *Agriculture for Development : World Development Report*. The World Bank. Washington DC.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.